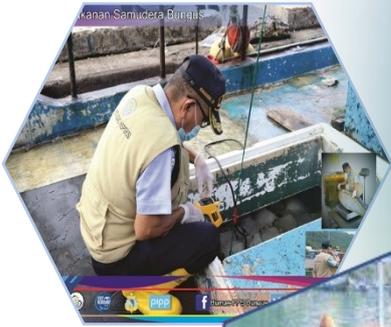




DJPT
BERGERAK
HARUKA BERSAMA • INOVASI • AKSELERASI

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2021



**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

pps_bungus@yahoo.com

Telp : 0751 751121

Fax : 0751 751122

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja baik keberhasilannya maupun hal-hal lain yang harus ditinjau kembali agar dapat mencapai keberhasilan, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas PPS Bungus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini berisikan tentang Rencana Strategis tahun 2021, Rencana Kinerja tahun 2021, dan Capaian Kinerja 2021. Seluruh hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dituangkan secara transparan dan akuntabel dalam Laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem AKIP dan penyajian Laporan Kinerja di masa yang akan datang.

Demikianlah laporan ini kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih.

Bungus, 17 Januari 2022

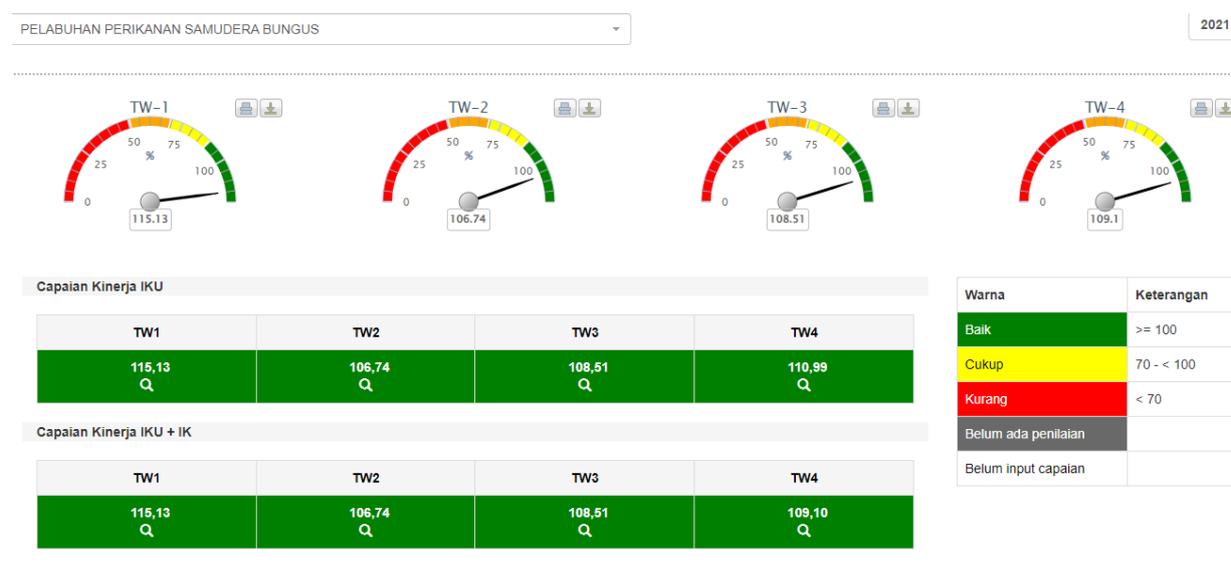
**Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 12,564,907,000,- untuk Tahun 2021 dimana yang terealisasi sebesar Rp. 12,327,601,506,- atau mencapai 98,11% pada Tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus pada tahun 2021 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 109,10%.

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2021 PPS Bungus



Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus s/d Triwulan IV Tahun 2021 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai target s/d Triwulan IV Tahun 2021 yang mencapai angka lebih atau diatas 100% dengan 16 (enam belas) IKU tercapai dan satu IKU tidak tercapai (Indikator Kinerja Terlampaui).

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian Output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategis berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus s/d Triwulan IV tahun 2021 dapat disajikan pada diagram di bawah ini, berdasarkan Dashboard Peta Strategis s/d triwulan IV pada Aplikasi Kinerja: www.kinerjaku.kkp.go.id.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.2. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
1.2.1. KELOMPOK OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	3
1.2.2. KELOMPOK TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA.....	4
1.2.3. SUB BAGIAN TATA USAHA.....	5
1.2.4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.....	6
1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP	9
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	10
2.3. PERMASALAHAN	15
2.4. RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2021	15
2.5. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2021	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	19
3.1.1. <i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>	21
3.1.2. <i>CUSTOMER PERSPECTIVE (OUTPUT)</i>	23
3.1.3. <i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (PROCESS)</i>	33
3.1.4. <i>LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (INPUT)</i>	45
BAB IV PENUTUP	62
4.1. KESIMPULAN	62
4.2. SARAN.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2021 PPS Bungus.....	ii
Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2021.....	6
Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021	11
Gambar 4. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS).....	62

LAMPIRAN

Lampiran 1 : RENCANA KINERJA

Lampiran 2 : PERJANJIAN KINERJA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Informasi cascading/ Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021.....	13
Tabel 2	Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021	16
Tabel 3	Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 yang mengacu kepada <i>Balanced Scorecard</i> (BSC).....	17
Tabel 4	Capaian IKU PPS Bungus Hasil <i>Balanced Scorecard</i> (BSC) Tahun 2021	19
Tabel 5	Target dan Realisasi IKU Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2021	22
Tabel 6	Perbandingan Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama.....	22
Tabel 7	Perbandingan Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus dengan Target Menengah.....	22
Tabel 8	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus	23
Tabel 9	Target dan Realisasi Nilai PNBP di PPS Bungus	24
Tabel 10	Rincian Realisasi PNBP PPS Bungus Tahun 2021.....	24
Tabel 11	Perbandingan Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	25
Tabel 12	Perbandingan Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah	25
Tabel 13	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	26
Tabel 14	Target dan Realisasi Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572	27
Tabel 15	Perbandingan Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama.....	27
Tabel 16	Perbandingan Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 dengan target Menengah.....	28
Tabel 17	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572	28
Tabel 18	Target dan Realisasi Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus	29
Tabel 19	Perbandingan Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	29
Tabel 20	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus	30
Tabel 21	Capain Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2021	31
Tabel 22	Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus.....	31
Tabel 23	Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	32
Tabel 24	Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus dengan Target Menengah.....	32
Tabel 25	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus.....	33

Tabel 26	Target dan Realisasi Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya.....	34
Tabel 27	Perbandingan Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama.....	34
Tabel 28	Perbandingan Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya dengan Target Menengah.....	34
Tabel 29	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya	35
Tabel 30	Target dan Realisasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	36
Tabel 31	Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	37
Tabel 32	Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah.....	37
Tabel 33	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	38
Tabel 34	Target dan Realisasi Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya	39
Tabel 35	Perbandingan Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	39
Tabel 36	Perbandingan Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya dengan Target Menengah	40
Tabel 37	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya	40
Tabel 38	Target dan Realisasi Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus	41
Tabel 39	Perbandingan Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	41
Tabel 40	Perbandingan Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus	42
Tabel 41	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus.....	42
Tabel 42	Target dan Realisasi Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus ..	43
Tabel 43	Perbandingan Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	43
Tabel 44	Perbandingan Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus dengan Target Menengah	44
Tabel 45	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus.....	44
Tabel 46	Target dan realisasi IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.....	46
Tabel 47	Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Periode yang Sama.....	46
Tabel 48	Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah.....	46

Tabel 49	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	47
Tabel 50	Target dan Realisasi Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus	48
Tabel 51	Perbandingan Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	48
Tabel 52	Perbandingan Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus	49
Tabel 53	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus	49
Tabel 54	Target dan Realisasi Nilai PM SAKIP PPS Bungus	50
Tabel 55	Perbandingan Nilai PMSAKIP PPS Bungus Pada tahun 2020 Pada Periode yang Sama	50
Tabel 56	Perbandingan Nilai PM SAKIP PPS Bungus dengan Target Menengah	50
Tabel 57	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PM SAKIP PPS Bungus	51
Tabel 58	Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus	52
Tabel 59	Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus Pada tahun 2020 Pada Periode yang Sama	52
Tabel 60	Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus dengan Target Menengah	52
Tabel 61	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus	53
Tabel 62	Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus	54
Tabel 63	Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	55
Tabel 64	Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus dengan Target Menengah	55
Tabel 65	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus	55
Tabel 66	Target dan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	56
Tabel 67	Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama	57
Tabel 68	Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah	57
Tabel 69	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	58
Tabel 70	Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	59
Tabel 71	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada tahun 2020 Pada Periode yang Sama	59
Tabel 72	Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan target Menengah	59
Tabel 73	Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	60

Tabel 74. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2021	61
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus adalah salah satu dari 22 buah pelabuhan perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPS Bungus terletak di Jl. Raya Padang-Painan KM. 16 Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

PPS Bungus mempunyai visi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan Misinya adalah 1) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Memadai dan Ramah Lingkungan, 2) Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah (*Value Added*) dan Daya Saing Produk Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan, 3) Meningkatkan Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan yang Akurat dan Update. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusunlah Rencana Strategis, yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Rencana Starategis yang telah disusun, selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada Renstra tersebut, dibuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Dalam rangka mengimplementasikan Renstra, maka disusunlah dokumen Perencanaan Kinerja (RENJA) yang didalamnya tercantum rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan pembiayaan yang dibutuhkan setiap tahun anggaran. RENJA tersebut juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntable sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindaklanjut

pelaksanaan ditahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Mencakup hal tersebut diatas, pada tahun 2021 PPS Bungus melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RENSTRA 2020-2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja PPS Bungus secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mendukung pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja tahun 2021 ini akan menginformasikan keberhasilan dalam pencapaian indikator selama tahun 2021 sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahunan (RKT) 2021 dan Perjanjian Kinerja.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Sedangkan dalam rangka melaksanakan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pengusaha sebagai berikut :

a. Fungsi Pemerintahan

- ✓ Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- ✓ Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- ✓ Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- ✓ Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- ✓ Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;

- ✓ Pelaksanaan kesyahbandaran;
- ✓ Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- ✓ Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- ✓ Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- ✓ Pemantauan wilayah pesisir;
- ✓ Pengendalian lingkungan;
- ✓ Kepabeanan; dan/atau
- ✓ Keimigrasian.

b. Fungsi Pengusahaan

- ✓ Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- ✓ Pelayanan bongkar muat ikan;
- ✓ Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- ✓ Pemasaran dan distribusi ikan;
- ✓ Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- ✓ Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- ✓ Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- ✓ Wisata bahari; dan/atau
- ✓ Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, sebagai berikut :

1.2.1.KOORDINATOR KELOMPOK OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN

a. Tugas :

Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhan, kapal perikanan dan kesyahbandaran

b. Fungsi :

- ✓ Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
- ✓ Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan

- dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- ✓ Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
 - ✓ Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
 - ✓ Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
 - ✓ Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
 - ✓ Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
 - ✓ Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
 - ✓ Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan
 - ✓ Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha
- c. Subkoordinator dan Tugasnya :
- Kelompok Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran terdiri atas:
- ✓ Subkoordinator Kelompok Operasional Pelabuhan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB; dan
 - ✓ Subkoordinator Kelompok Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat, Tanda Bukti Laport, pemeriksaan Log Book, penerbitan Surat Persetujuan, Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan, pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan, kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.2. KOORDINATOR KELOMPOK TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA

- a. Tugas:
- Melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan.
- b. Fungsi:
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

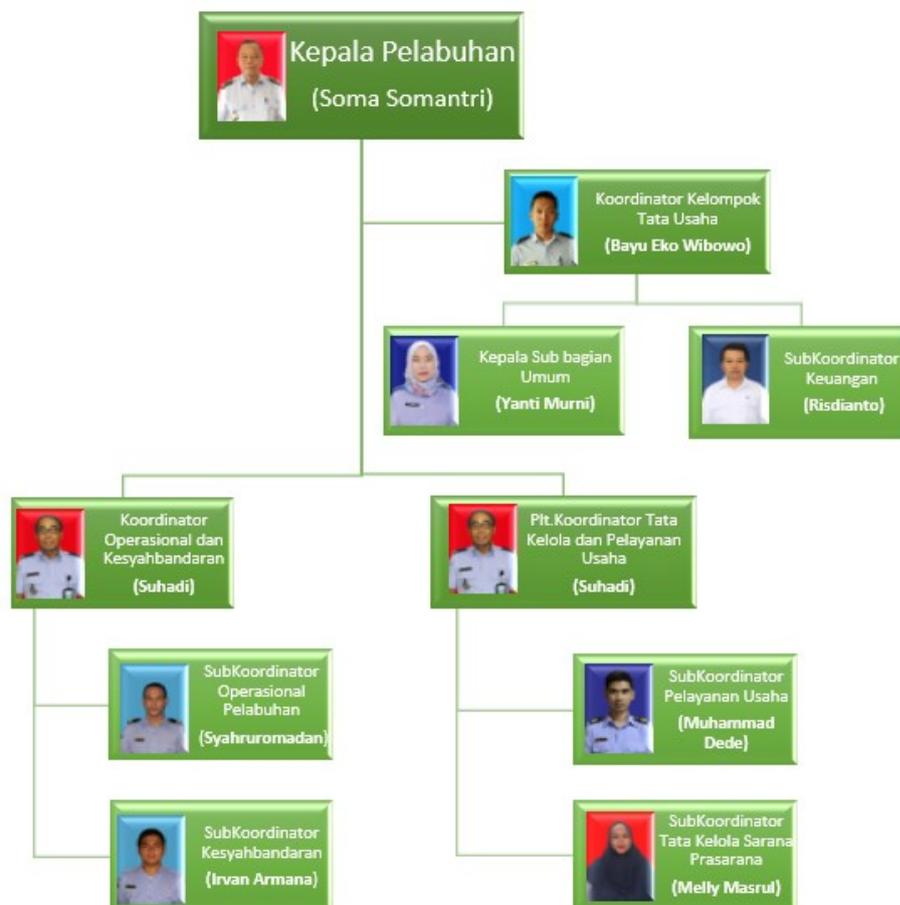
- c. Subkoordinator dan Tugasnya :
- ✓ Subkoordinator Kelompok Tata Kelola Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan.
 - ✓ Subkoordinator Kelompok Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.

1.2.3. KOORDINATOR KELOMPOK TATA USAHA

- a. Tugas :
- Pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.
- b. Fungsi:
- Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan pengendalian lingkungan, pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.
- c. Sub Koordinator dan Tugas nya :
- ✓ Subkoordinator Kelompok Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
 - ✓ Subkoordinator Kelompok Umum sebagaimana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja), pengelolaan Barang Milik Negara, rumah tangga, pelayanan masyarakat perikanan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

1.2.4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut diatas PPS Bungus dengan struktur organisasinya berkewajiban memberikan kinerja yang terbaik bagi perwujudan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dievaluasikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



Gambar 2. Struktur Organisasi PPS Bungus Tahun 2021

1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan dengan transparan serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian

kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus selama tahun 2021 akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2021 yang telah ditargetkan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Dari analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukannya proses identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja yang ada bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tahun 2021 sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Disebutkan juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab Pendahuluan ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab III Akuntabilitas

4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

4.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab Penutup ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Kepala Pelabuhan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku penanggung jawab Program memiliki peran strategis, yakni sebagai: (I) penyedia bahan pangan dari perairan yang mempunyai nilai tinggi dari, ditinjau dari aspek nutrisi maupun ekonomi, (II) penyedia lapangan kerja bagi masyarakat di daerah pesisir, (III) salah satu Kelompok andalan dalam kegiatan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang turut serta dalam menjaga kedaulatan bangsa di laut, (IV) penyumbang potensial untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, serta (V) identitas budaya negara maritim yang perlu dijaga dan dilestarikan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Pembangunan Perikanan Tangkap yang Berdaulat, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan” dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdaulat diartikan sebagai kemampuan penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan untuk digunakan sebesar-besarnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kedaulatan
2. Mandiri diartikan sebagai keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Berdaya saing diartikan sebagai keunggulan dan kapasitas yang dimiliki untuk menghadapi persaingan dalam peta kompetisi global dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
4. Berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola dan melindungi sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.
5. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan serta merupakan penjabaran dari misi pembangunan nasional. Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Turut serta dalam mewujudkan kedaulatan di laut dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai strategis secara sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan dan keamanan;
2. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
3. Meningkatkan kapasitas dan daya saing dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis telah menyusun rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai guna menjalankan Rencana Strategis yang telah dicanangkan.

Dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran strategis yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan rencana kerja tersebut harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. PPS Bungus perlu menerapkan strategi guna mengimplementasikan tujuan pembangunan perikanan tangkap tersebut, dengan menetapkan Sasaran Strategis yang dapat dipergunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Gambar 3. Peta Strategi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan bagian dari Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang terbagi dalam 4 (tiga) perspektif, yaitu :

1. *Stakeholder Perspective*

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja berupa Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap.

2. *Customer Perspective (Output)*

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dan sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-2);
- b. Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (SS-3);

- c. Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (SS-3);
- d. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-4).

3. *Internal Process Perspective (process)*

Sasaran strategis yang termasuk kedalam *Internal Process Perspective* adalah Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-5), Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan (SS-6), Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-7), dan Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-8) dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (SS-5);
- b. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan (SS-6);
- c. Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (SS-7);
- d. Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan (SS-7);
- e. Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (SS-8).

4. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksanakannya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* di PPS Bungus. Untuk mendukung hal tersebut, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu adanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- b. Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- c. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- d. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;

- f. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- g. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;

Informasi cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I Kepada Bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informasi cascading/ Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	FREKUENSI	POLA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)	100	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Nilai PNBPD Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.214	Bulanan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok TKPU dan Bagian Tata Usaha
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (Dokumen)	1	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran
		Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (Laporan)	100	Bulanan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran
4.	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	5.000	Bulanan	Akumulasi	Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran
5.	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	1	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok TKPU
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan (Persen)	81	Bulanan	Rata-Rata	Semua Kelompok
7.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan	Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (Orang)	10	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran

	Perikanan Samudera Bungus	Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	20	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran
8.	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Kelompok Operasional dan Kesyahbandaran
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	72	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Semua Kelompok
		Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Semua Kelompok
		Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85,15	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Semua Kelompok
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Bagian Tata Usaha
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Bagian Tata Usaha
		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Bagian Tata Usaha
		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Bagian Tata Usaha

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengamanatkan satu program utama yang menaungi seluruh kegiatan perikanan tangkap, yakni “Pengelolaan Perikanan Tangkap”. Dari Program utama tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam 5 (lima) Kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat penangkapan Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap;

2.3. PERMASALAHAN

Dalam upaya mendukung agar suksesnya program pembangunan perikanan tangkap, PPS Bungus menghadapi beberapa permasalahan yang timbul baik di internal maupun berbagai kendala yang berasal dari luar. Adapun yang menjadi masalah pada triwulan IV ini adalah sebagai berikut:

1. SIPI Kapal Bagan > 30 GT tidak keluar, terkendala ukuran mata jaring sesuai dengan Permen KP No.59 Tahun 2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di WPPNRI Dan Laut Lepas;
2. Aktivitas kegiatan kapal di dermaga berkurang seiring dengan berkurangnya aktivitas bongkar muat kapal perikanan;
3. Berkurangnya kegiatan kapal penyuplai bahan umpan dan ransum;
4. Berkurangnya penggunaan air di pabrik es dan kapal perikanan;
5. Berkurangnya penggunaan Cold Storage sebagai penampung sementara hasil tangkapan kapal perikanan.
6. Adanya tunggakan pelayanan jasa kepelabuhan seperti
 - Jasa Cold storage
 - Jasa Tambat, Kebersihan Kolam, dan Pas Masuk Kendaraan
7. Adanya tunggakan pembayaran PNBPN atas Pengelolaan BMN oleh Pihak Ketiga, yakni:
 - PT. Dempo Andalas atas biaya pemeliharaan prasarana;
 - PT. Amar Mandiri Sejahtera atas biaya pemeliharaan prasarana;
 - PT. Damitama Mina atas biaya pengelolaan tanah dan bangunan tanah;
 - Penyewa Kios BAP I dan BAP II atas biaya pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan bangunan, serta biaya kebersihan;
 - Andy Syahputra atas biaya pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan bangunan, serta biaya kebersihan.

2.4.RENCANA KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2021

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya, guna pencapaian sasaran yang sejalan dengan visi

dan misi yang telah ditetapkan. Adapun Rencana kinerja tahunan 2021 disajikan pada tabel berikut (telah disesuaikan dengan *refocusing* Anggaran per November 2021) :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran 2021 (Rp.)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			1.581.132.000
1	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Terselenggaranya Tata Kelola pemanfaatan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing dan berkelanjutan	16.500.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang profesional dan partisipatif	1.416.090.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu	41.455.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDI secara berkelanjutan	107.087.000
Program Dukungan Manajemen			10.983.775.000
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Terkelolanya anggaran pembangunan UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus secara efisien dan akuntabel	10.983.775.000

2.5. PENETAPAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2021

Penetapan Kinerja yang telah disusun oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan serta Sasaran Strategis yang telah disusun dalam rangka mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis (SS) dikelompokkan kedalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PPS

Bungus pada tahun 2021, untuk semua sasaran strategis berjumlah 9 Sasaran Program dan 17 IKU. Sasaran strategis ini merupakan suatu panel instrumen yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi PPS Bungus. Sasaran strategis ini berfungsi untuk memudahkan PPS Bungus untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya dalam rangka menyukseskan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh PPS Bungus sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 yang disusun pada awal tahun 2021 berdasarkan *Balanced Scorecard* (BSC) PPS Bungus, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)	100
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2.	Nilai PNBPD Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.214
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3.	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (Dokumen)	1
		4.	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (Laporan)	100
4.	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	5.000
5.	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	6.	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	1
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	7.	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan (Persen)	81
7.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8.	Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (Orang)	10
		9.	Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	20
8.	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10.	Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	11.	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	73
		12.	Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10

		13.	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85,15
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		16.	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89
		17.	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan beralihnya pengelolaan kinerja KKP, yang telah mengimplementasikan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), PPS Bungus dalam hal ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perikanan Tangkap ikut serta dalam melaksanakan Visi, Misi, dan Tujuan yang ingin dicapai oleh Ditjen Perikanan Tangkap dengan melaksanakan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diturunkan oleh DJPT maupun yang ditetapkan sendiri oleh PPS Bungus.

Tabel 4 . Capaian IKU PPS Bungus Hasil *Balanced Scorecard* (BSC) Triwulan IV Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET					REALISASI				% Capaian Tahunan	
			Tahun	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)	100	25	25	25	100	29	29	29	29	116
2	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2	Nilai PNBPD Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1214	200,1	300	300	1214	224,72	203,81	266,65	449,315	94,28
3	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (Dokumen)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100
		4	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (Laporan)	100	25	25	25	100	124	94	95	86	399
4	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	5000	842	1.501	1.522	1135	1081,4	1447,1	1.612,21	1390,71	110,63
5	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	6	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100
6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan (Persen)	81	81	81	81	81	83	81,42	82,75	82,85	102,28

	Saing Dan Berkelanjutan													
7	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8	Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (Orang)	10	10	-	-	-	27	-	-	-	270%	
		9	Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	20	-	20	-	20	-	23	-	-	115%	
8	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10	Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	-	-	-	75	-	-	-	82,03	109,37	
9	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	11	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	73	-	65	-	73	-	69,29	-	80,51	110,29	
		12	Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10	-	-	-	45,10	-	-	-	-	64,94	143,9
		13	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85,15	-	-	-	85,15	-	-	-	-	90,75	106,58
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5	-	-	-	72,5	-	-	-	-	88,40	121,9
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5	-	-	-	72,5	-	-	-	-	87,50	120,68
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89	-	-	-	89	-	92,45	-	-	97,58	109,64
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86	-	-	-	86	-	-	-	-	86,53	100,62

Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi indikator triwulan IV tahun 2021 terhadap target capaian triwulan IV tahun 2021;
2. Membandingkan realisasi indikator tahun 2021 terhadap target tahun 2021;
3. Membandingkan realisasi indikator tahun 2021 terhadap target indikator tahun 2021 yang merupakan awal RPJMN dan tahun 2024 sebagai tahun akhir RPJMN. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPS/Kepala Bappenas);
4. Membandingkan realisasi indikator tahun 2021 terhadap target indikator yang sifatnya standar nasional (apabila ada) dengan tujuan untuk mengukur pencapaian PPS Bungus terhadap capaian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan capaian nasional;
5. Menyajikan analisa (penyebab) terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target tahun 2021 berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator;
6. Menyajikan besarnya jumlah sumberdaya yang digunakan berupa alokasi anggaran dalam upaya mencapai target indikator tahun 2021 sesuai dengan yang terdapat pada dokumen penganggaran (RKAKL). Analisa ini terbatas pada *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* dikarenakan kedua perspektif ini sifatnya proses dan input (masukan) yang dapat langsung diukur efeknya terhadap pencapaian indikator, sedangkan kedua perspektif lainnya yakni *stakeholder perspective* dan *costumer perspective* merupakan dampak atau hasil dari pencapaian indikator;
7. Menyajikan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator tahun 2021.

3.1.1. STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SS-1 Pendapatan Nelayan Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap.

1. Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap

a. Target dan Realisasi

Indikator Tingkat Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan kegiatan untuk

penyediaan pojok pendanaan untuk stakeholder yang akan melaksanakan konsultasi terkait kredit perikanan dipojok pendanaan tersebut. Adapun capaian pada Triwulan IV ini sebanyak 29 nelayan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus	100	116	116

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator pendanaan usaha nelayan sebanyak 116 orang, yang berarti bahwa indikator ini telah tercapai. Ketercapaian indikator ini didukung dengan adanya kerja sama dengan pihak Bank BRI dan upaya dari PPS Bungus dalam memfasilitasi nelayan berupa pengadaan sosialisasi terkait pendanaan usaha kepada para nelayan.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 6 Perbandingan Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2020	2021	2020	2021	
Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus	50	100	50	116	+ 16

Pada tahun 2021, terjadi kenaikan capaian indikator jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha yakni sebesar 16% dari tahun 2020. Hal ini didukung oleh kerjasama yang dilakukan oleh PPS Bungus dengan Bank BRI.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 7 Perbandingan Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus	116	50	232%

Apabila dibandingkan dengan target menengah dalam renstra, maka persentase perbandingan indikator ini sebesar 232%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap di PPS Bungus pada tahun 2021 didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- Dilakukannya koordinasi dengan pihak Bank BRI
- Dilakukannya sosialisasi penyaluran pendanaan usaha nelayan di Sungai Pisang
- Dilakukannya sosialisasi penyaluran pendanaan usaha nelayan di Pasie Nan Tigo

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja bahan : Rp. 1.000.000,-
- Belanja Honor Output kegiatan : Rp. 3.000.000,-

Tabel 8 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap Di PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Tahun 2021 (%)	Realisasi Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
4.000.000	3.987.000	116	99,7	16,3

Capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 116% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.987.000,-. Sehingga tingkat efisiensi indikator ini mencapai 16,3%.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Komponen kegiatan yang menunjang IKU ini adalah adanya evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan.

3.1.2. CUSTOMER PERSPECTIVE (OUTPUT)

SS-2 Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT PPS Bungus.

1. Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

a. Target dan Realisasi

Indikator nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang diperoleh pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang berada di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 9 Target dan Realisasi Nilai PNBPN di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Nilai PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.214	1.144,50	94.28

Realisasi indikator ini meliputi realisasi penerimaan atas pelayanan jasa yang telah diberikan oleh PPS Bungus terhadap *stakeholder*, sebagaimana sesuai dengan tarif pelayanan yang tercantum dalam PP 75 Tahun 2015 dan PP 85 Tahun 2021 tentang Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (telah direvisi dalam PP No 85 Tahun 2021). Penerimaan tersebut disetorkan setiap harinya oleh petugas pelayanan jasa kepada bendahara penerimaan untuk kemudian disetorkan kembali kepada negara dan diakumulasikan setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Realisasi PNBPN PPS Bungus Tahun 2021

No	Bulan	Realisasi PNBPN
1	Januari	Rp. 48.700.415,00
2	Februari	Rp. 95.738.526,00
3	Maret	Rp. 80.289.928,00
4	April	Rp. 70.040.386,00
5	Mei	Rp. 50.309.249,00
6	Juni	Rp. 83.456.412,00
7	Juli	Rp. 78,579,057,00
8	Agustus	Rp. 110,048,666,00
9	September	Rp. 78,027,112,00
10	Oktober	Rp. 52,313,272
11	November	Rp. 327,346,468
12	Desember	Rp. 69,654,804
Total		Rp. 1,144,504,295,-

Berdasarkan tabel 9 dan Tabel 10 di atas, terlihat bahwa capaian indikator nilai PNBP di PPS Bungus pada Tahun 2021 tidak mencapai target, dengan persentase capaian sebesar 94,28% dari target 2021.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 11 Perbandingan Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Rp. (Juta)	780,6	1.214	1.337,2	1.144,5	- 77,02

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 maka terdapat penurunan capaian penerimaan PNBP sebesar 11,14%. Hal ini diakibatkan karena tidak tercapainya target indikator, sehingga persentase capaian pada tahun 2021 menjadi rendah.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 12 Perbandingan Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.144,5	1000	114,5%

Apabila dibandingkan dengan target menengah dalam renstra, persentase perbandingan mencapai 114,5%. Capaian yang dihitung adalah delapan triwulan dari target dua belas triwulan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan standar Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Capaian Indikator nilai PNBP Tahun 2021 tidak mencapai target. Ketidaktercapaian target ini disebabkan karena kondisi sebagai berikut :

1. SIPI Kapal Bagan > 30 GT tidak keluar, terkendala ukuran mata jaring sesuai dengan Permen KP No.59 Tahun 2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Alat Penangkapan Ikan Di WPPNRI Dan Laut Lepas;

2. Aktivitas kegiatan kapal di dermaga berkurang seiring dengan berkurangnya aktivitas bongkar muat kapal perikanan;
3. Berkurangnya kegiatan kapal penyuplai bahan umpan dan ransum;
4. Berkurangnya penggunaan air di pabrik es dan kapal perikanan;
5. Berkurangnya penggunaan *Cold Storage* sebagai penampung sementara hasil tangkapan kapal perikanan.
6. Adanya tunggakan pelayanan jasa kepelabuhan seperti
 - Jasa Cold storage
 - Jasa Tambat, Kebersihan Kolam, dan Pas Masuk Kendaraan
7. Adanya tunggakan pembayaran PNBP atas Pengelolaan BMN oleh Pihak Ketiga, yakni:
 - a. PT. Dempo Andalas atas biaya pemeliharaan prasarana;
 - b. PT. Amar Mandiri Sejahtera atas biaya pemeliharaan prasarana;
 - c. PT. Damitama Mina atas biaya pengelolaan tanah dan bangunan tanah;
 - d. Penyewa Kios BAP I dan BAP II atas biaya pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan bangunan, serta biaya kebersihan;
 - e. Andy Syahputra atas biaya pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan bangunan, serta biaya kebersihan.

Meskipun demikian, capaian 94,28% ini dapat dicapai karena adanya optimalnya pelaksanaan jasa pelayanan dan pemungutan PNBP yang tidak mengalami masalah dan dengan adanya dukungan terhadap pelaksanaan dan manajemen PNBP pelabuhan.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 13 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Tahun 2021 (%)	Realisasi Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
7.730.000	7.501.500	94,28	97,04	-2,76

Alokasi Anggaran Tahun 2021 yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan IKU ini sebesar Rp. 7.730.000,-. Total penyerapan anggaran Tahun 2021 berjumlah Rp. 7.501.500,- yang digunakan untuk Manajemen Pnbp, Sumber Daya Perikanan Dan Imbal Jasa Pelabuhan. Berdasarkan tabel 13. Dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi untuk indikator kinerja ini adalah -2,76%. Efisiensi minus disebabkan karena ketidaktercapaian target nilai PNBP.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Komponen kegiatan yang menunjang tercapainya nilai PNBP di PPS Bungus adalah Manajemen PNBP SDA perikanan dan imbalan jasa pelabuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan capaian PNBP pelayanan jasa melalui koordinasi dengan instansi terkait dan rapat evaluasi capaian PNBP.

SS-3 Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedua (SS-3) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572

Indikator yang menunjukkan gambaran tentang upaya/kegiatan pengelolaan sumber daya ikan di perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Laut ZEEI, Laut Lepas yang terkelola pemanfaatan dan sumber daya ikannya (WPP).

a. Target dan Realisasi

Tabel 14 Target dan Realisasi Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (Dokumen)	1	1	100

Indikator kinerja ini dapat terealisasi dengan terlaksananya kegiatan Forum Koordinasi Nasional Pengelolaan SDI Berbasis Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) WPPNRI 572 Tahun 2021.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 15 Perbandingan Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2020	2021	2020	2021	
Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572	-	1	-	1	-

Perbandingan dengan tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena indikator ini tidak ada pada tahun 2020.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 16 Perbandingan Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 dengan target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572	1	1	100

Dalam hal ini perbandingan persentase capaian pelaksanaan Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021 sebesar 100%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan realisasi IKU ini adalah tercapainya realisasi pelaksanaan pengelolaan SDI di WPP 572 dengan terselenggaranya kegiatan Forum Koordinasi Nasional Pengelolaan SDI Berbasis Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) WPPNRI 572 Tahun 2021 pada tanggal 04 November 2021, yang dihadiri oleh para stakeholder terkait, baik secara daring (zoom meeting) maupun offline.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 17 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Tahun 2021	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
80.000.000	72.422.925	100	90,53	9,47

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan IKU ini mengalami refocusing pada bulan Juli Tahun 2021. Semula Rp. 115.000.000,- menjadi Rp. 80.000.000,- . Total penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV berjumlah Rp. 72.422.925,- atau sebesar 90,53%. Realisasi anggaran ini digunakan untuk keperluan Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dan Operasionalisasi Sekretariat Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Tingkat efisiensi indikator ini sebesar 9,47% dengan capaian indikator sebesar 100%.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Adapun kegiatan yang menunjang IKU ini adalah adanya operasionalisasi sekretariat lembaga pengelola perikanan WPPNRI dan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan WPPNRI dengan terlaksananya Forum Koordinasi Nasional Pengelolaan SDI Berbasis Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP) WPPNRI 572 Tahun 2021.

2. Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan

Indikator Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang telah dikumpulkan dan Diverifikasi di PPS Bungus merupakan ukuran jumlah unit kapal yang mengisi dan melaporkan logbook penangkapan. Kegiatan yang mendukung IKU ini adalah pengumpulan data logbook penangkapan ikan dan pengolahan dan analisis data logbook penangkapan ikan.

a. Target dan Realisasi

Tabel 18 Target dan Realisasi Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang telah dikumpulkan dan Diverifikasi di PPS Bungus	100	399	399

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator ini melebihi target tahunan, yakni mencapai 399 dari target 100 Laporan sehingga mencapai 399%. Keberhasilan capaian ini di dukung oleh komitmen petugas dalam melakukan penginputan dan pendataan logbook nelayan.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 19 Perbandingan Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan (%)
	2020	2021	2020	2021	
Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan	30	100	695	100	- 2078

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, ada penurunan sebesar 2078%. Hal ini disebabkan karena metode perhitungan jumlah laporan logbook Tahun 2021 berbeda

dengan tahun 2021. Pada tahun 2020, laporan logbook dihitung berdasarkan ID Logbook sehingga ada kapal yang berulang. Sedangkan ditahun 2021 perhitungan jumlah laporan logbook tidak berulang.

c. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional.

d. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian jumlah kapal yang menerapkan logbook penangkapan ikan salah satunya tidak terlepas dari peran dan komitmen petugas kesyahbandaran dalam melakukan pelayanan, sosialisasi penerapan logbook, serta pelaporan dan penginputan logbook penangkapan ikan.

e. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 20 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Laporan Data Logbook di PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Tahun 2021	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
27.087.000	25.273.861	399	93,31	305,69

Dalam menunjang pelaksanaan IKU Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di PPS Bungus tersedia anggaran sebesar Rp. 27.087.000. Sampai dengan Triwulan IV realisasi anggaran sebesar Rp. 25.273.861 atau 93,31% dari total keseluruhan anggaran yang dialokasikan. Maka dengan demikian tingkat efisiensi indikator ini adalah 305,69%. Tingginya tingkat efisiensi ini disebabkan karena persentase capaian indikator sangatlah besar.

Untuk menunjang capaian IKU ini realisasi anggaran digunakan untuk kegiatan:

- Belanja Bahan
- Belanja Honor Output Kegiatan
- Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan
- Honorium Panitia Sosialisasi Penerapan E-Logbook
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

f. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di PPS Bungus adalah

dilaksanakannya Sosialisasi penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan serta adanya komitmen petugas dalam melakukan penginputan dan pendataan logbook nelayan.

SS-4 Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedua (SS-4) yang akan dicapai adalah “Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

a. Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap UPT PPS Bungus merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan melalui *Cold Storage* dan yang didaratkan melalui laut di PPS Bungus. Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap bulan dan capaian pada Triwulan IV tahun 2021 adalah sebanyak 1390,71 ton atau 122,53% dari target Triwulan IV. Komposisi capaian produksi perikanan tangkap ini adalah dari produksi perikanan tangkap diperairan laut dan umum.

Tabel 21 Capain Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Produksi (TON) / Akumulasi
1	Januari	321,40
2	Februari	338,269
3	Maret	421,200
4	April	482,266
5	Mei	485,005
6	Juni	477,811
7	Juli	493,373
8	Agustus	483,910
9	September	634,926
10	Oktober	554,035
11	November	444,682
12	Desember	391,988
Total		5.531,404

Tabel 22 Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	5.000	5.531,404	110,63

Berdasarkan tabel 22. Terlihat bahwa capaian jumlah produksi perikanan tangkap PPS Bungus Tahun 2021 mencapai 5.531,404 Ton atau 110,63% dari target tahun 2021.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 23 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3.500	5.000	4776,14	5.531,404	- 25,84

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 25,84%. Hal ini dapat dijelaskan karena kondisi Covid-19 membuat banyak nelayan yang tidak melaut karena biaya operasional yang tinggi. Selain itu, pada Tahun 2021 ada kendala terkait SIPI Kapal Bagan > 30 GT yang juga berdampak pada penurunan jumlah produksi ikan di tahun ini.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 24 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.531,404	4.769	115,98

Jika dibandingkan dengan target tahun menengah dalam Renstra dengan capaian Tahun 2021, mencapai 115,98%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Kendala yang dialami adalah adanya masalah perizinan kapal 30 GT ke atas yang masih terkendala di Pusat yang menyebabkan SPB nya tidak dapat diterbitkan. Hal ini menyebabkan kapal yang melaut hanya menggunakan Surat Ampang dari pemerintah daerah. Sehingga hasil tangkapan Kapal GT 30 ke atas tidak dapat diinput.

Akan tetapi target pada tahun 2021 tetap dapat tercapai karena didukung oleh adanya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan selama setahun. Selain itu, didukung oleh komitmen dari petugas dalam melakukan kegiatan pendataan ikan di pelabuhan, adanya koordinasi dalam pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data perikanan tangkap serta kegiatan validasi dan sinkronisasi data perikanan tangkap.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 25 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
13.300.000	13.256.600	110,63	99,67	10,96

Pada Tahun Anggaran 2021, Target IKU Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengalokasikan anggaran sebesar Rp.13.300.000,-. Sampai dengan Triwulan IV persentase realisasi anggaran sebesar 99,67% yang digunakan untuk keperluan Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan. Dengan nilai capaian indikator sebesar 110,63%, maka tingkat efisiensi indikator ini mencapai 10,96%.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Adapun program/kegiatan yang menunjang kinerja Indikator Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPS Bungus adalah kegiatan pendataan ikan di wilayah pelabuhan dan komponen penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data perikanan tangkap serta kegiatan validasi dan sinkronisasi data perikanan tangkap.

3.1.3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (PROCESS)

SS-5 Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedua (SS-5) yang akan dicapai adalah “Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya

IKU Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya merupakan Jumlah Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan. Formula perhitungan IKU ini adalah Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan Fasilitasnya.

a. Target dan Realisasi

Tabel 26 Target dan Realisasi Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	1	1	100

Realisasi capaian Indikator ini mencapai 100% dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi sarana prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 27 Perbandingan Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase
	2020	2021	2020	2021	Kenaikan/Penurunan
Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya	1	1	1	1	0

Nilai persentase perbandingan indikator ini adalah 0, yang berarti konstan. Tidak ada kenaikan maupun penurunan. Hal ini disebabkan karena jumlah target dan realisasi capaian pada tahun 2020 sama dengan tahun 2021.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 28 Perbandingan Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya	1	1	100

Nilai perbandingan indikator ini dengan target menengah adalah 100%. Hal ini disebabkan karena jumlah target dan realisasi capaian pada tahun 2021 sama dengan jumlah target menengah dalam renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU ini adalah dengan tercapainya target jumlah Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, yakni adanya kegiatan penambahan nilai gedung dan bangunan yang meliputi :

- Rehabilitasi Kanopi TPI Higienis, Transit Sheet, Cold Storage, Kantor Pelayanan/Koperasi
- Rehabilitasi Epoxy TPI Higienis
- Rehabilitasi Epoxy Cold Storage

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 29 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
366.090.000	352.583.680	100	96,31	3,69

Anggaran untuk menunjang pelaksanaan IKU Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya ini mengalami *refocusing*, semula Rp.1.800.000.000,- menjadi Rp. 366.090.000,- sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 penyerapan anggaran untuk kegiatan IKU ini sebesar 96,31%, sementara capaian indikatornya adalah 100%. Maka dengan demikian tingkat efisiensinya adalah 3,69%.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang dapat menunjang IKU ini adalah dengan akan dilaksanakannya rehabilitasi prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, antara lain :

- Rehabilitasi Kanopi TPI Higienis, Transit Sheet, Cold Storage, Kantor Pelayanan/Koperasi
- Rehabilitasi Epoxy TPI Higienis
- Rehabilitasi Epoxy Cold Storage

SS-6 Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan

Sasaran strategis kedua (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan penilaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan sesuai keputusan Dirjen No 20/2015 tentang pedoman evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Indikator tingkat operasional di UPT PPS Bungus yang memenuhi standar merupakan persentase jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan yang tersedia.

a. Target dan Realisasi

Tabel 30 Target dan Realisasi Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (persen)	81	82,85	102,28

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi tahun 2021 melebihi target, yakni mencapai 102,28%. Pencapaian realisasi tingkat operasional ini dipengaruhi oleh evkin sebagai data dukung indikator kinerja ini bersifat dinamis, ketika terdapat update data terbaru maka akan mempengaruhi capaian kinerja triwulan maupun tahunan.

Rincian capaian nilai evaluasi kinerja Tahun 2021 yang diambil dari Aplikasi PIPP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 31 Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2021

No	Bulan	Nilai Evkin
1	Januari	84
2	Februari	81.75
3	Maret	83.25
4	April	78.75
5	Mei	82.25
6	Juni	83.25
7	Juli	82
8	Agustus	82
9	September	84.25
10	Oktober	84.25
11	November	84.25
12	Desember	84.25
Rata-Rata		82,85

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Tabel 32 Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	75	81	82,16	82,85	- 7,22%

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020, terdapat penurunan persentase IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar 7,22%. Hal ini dipengaruhi oleh nilai target pada tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020, sehingga persentasenya menjadi lebih kecil.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 33 Perbandingan Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	82,52	80	103,15

Apabila dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra, realisasi capaian IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sudah mencapai 103,43%. Hal ini dikarenakan nilai evkin yang dijadikan sebagai data dukung bersifat dinamis sehingga apabila terdapat update data akan mempengaruhi capaian evkin.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan Target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Nilai Evkin yang dijadikan sebagai data dukung bersifat dinamis sehingga apabila terdapat update data akan mempengaruhi capaian evkin. Sehingga dengan adanya konsistensi dan komitmen dari petugas dalam penginputan data dan informasi ke dalam aplikasi PIPP dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan menginputan secara rutin setiap bulannya, menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 34 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Tahun 2021	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
515.000.000	477.422.103	102,28	92,7%	9,58

Pada Tahun anggaran 2021, untuk menunjang target IKU Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 515.000.000,- . Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai Rp. 477.422.103,- atau sebesar 102,28% dari total anggaran. Dengan penyerapan anggaran 92,7% , realisasi capaiannya indikator adalah 102,28%. Dengan demikian tingkat efisiensinya adalah 9,58%.

Penyerapan anggaran sebesar 92,7% ini digunakan untuk komponen :

- Pengelolaan dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan dan Operasional Sertifikasi Hasil tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan dan Operasional Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan dan Operasional PSM di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan dan Operasional ISO di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan dan Operasional Kegiatan SPD di Pelabuhan Perikanan
- Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang tercapainya IKU tingkat operasional pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan kegiatan operasional di pelabuhan perikanan seperti; Pengelolaan dan Operasional Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan; Pengelolaan dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan; Pengelolaan dan Operasional Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan; Pengelolaan dan Operasional Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan; PSM di Pelabuhan Perikanan; ISO di Pelabuhan Perikanan; Kegiatan di SPDN di Pelabuhan Perikanan; Pengelolaan dan Operasional Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

SS-7 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedua (SS-7) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah ABK Perikanan yang mengikuti Bimbingan Teknis Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I. Adapun formula perhitungan IKU ini adalah dengan merekapitulasi jumlah ABK yang mengikuti Bimbingan Teknis Keterampilan Penanganan Ikan Tingkat I di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

a. Target dan Realisasi

Tabel 35 Target dan Realisasi Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (Orang)	10	27	270

Capaian IKU ini sudah terealisasi pada triwulan I Tahun 2021. Dengan demikian capaian pada tahun 2021 sebesar 270% dari target.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Tabel 36 Perbandingan Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya	12	10	6	27	+ 220

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka terjadi kenaikan capaian sebesar 220% pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 kondisi wabah covid-19 sudah lebih stabil, maka dapat dilakukan kegiatan sosialisasi dan sertifikasi awak kapal. Hal ini menjadi faktor pendukung pencapaian indikator ini.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 37 Perbandingan Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya	27	32	84,37

Pada tahun 2021, capaian indikator ini sebesar 270% dari target. Apabila dibandingkan dengan target menengah dalam renstra, maka perbandingannya adalah 84,37%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan Target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian IKU ini tidak terlepas dari usaha petugas kesyahbandaran dalam melakukan sertifikasi keterampilan kepada para nelayan, meskipun dalam keterbatasan wabah covid-19.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 38 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
3.500.000	3.500.000	270	100	170%

Dalam menunjang pelaksanaan IKU Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya tersedia anggaran sebesar Rp. 3.500.000,-. sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 penyerapan anggaran untuk kegiatan IKU ini sebesar sebesar 100% dari total alokasi anggaran. Dengan capaian indikator sebesar 270% maka tingkat efisiensinya adalah 170%.

Realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini digunakan untuk keperluan belanja bahan dan belanja honor output kegiatan.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU ini adalah adanya program Kursus & Pelatihan Sertifikasi Keterampilan Penangkapan Ikan Tingkat 1 (SKPI) yang diselenggarakan oleh PPS Bungus.

2. Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan di PPS Bungus

IKU Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah awak kapal yang sudah menerapkan Perjanjian Kerja Laut (PKL). PKL adalah Perjanjian Kerja antara pemilik kapal dengan awak kapal perikanan. Format perhitungan IKU ini adalah melakukan rekap data jumlah awak kapal yang sudah menerapkan PKL di PPS Bungus.

a. Target dan Realisasi

Tabel 39 Target dan Realisasi Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus (Orang)	20	23	115

Target IKU ini telah tercapai pada TW II. Pada tahun 2021, capaian indikator ini melebihi target tahunan, yakni sebesar 115%. Keberhasilan capaian IKU ini disebabkan oleh adanya konsistensi kesyahbandaran PPS Bungus dalam mewajibkan pemilik kapal untuk membuat PKL sesuai dengan Permen KP Nomo 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut sebelum merekrut awak kapal. Selanjutnya pihak kesyahbandaran Bungus juga akan menunda pemberangkatan kapal perikanan yang ABK nya belum mempunyai PKL.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Tabel 40 Perbandingan Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus	-	20	-	23	-

IKU Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus merupakan IKU baru ditahun 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 41 Perbandingan Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus	23	-	-

IKU Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan di PPS Bungus tidak ada dalam Renstra. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan Target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator kinerja sebesar 115% dari target tahun 2021 ini didukung dengan adanya kegiatan Sertifikasi HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut serta jaminan Sosial Bagi Awak Kapal Perikanan (Pelaksanaan Dalam Kantor/Balai Nelayan/Pemerintah).

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 42 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan di PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
13.000.000	12.916.000	115	99,35	15,65

Dalam menunjang pelaksanaan IKU Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya tersedia anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 penyerapan anggaran untuk kegiatan IKU ini mencapai 99,35% dengan capaian indikator sebesar 115%. Maka dengan demikian, tingkat efisiensinya adalah 15,65%. Penyerapan anggaran yang tersedia digunakan untuk keperluan: belanja bahan; belanja honor output; belanja jasa profesi, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian IKU ini adalah Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Pengetahuan/Kompetensi Nelayan berupa kegiatan Sertifikasi HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut serta jaminan Sosial Bagi Awak Kapal Perikanan (Pelaksanaan Dalam Kantor/Balai Nelayan/Pemerintah).

SS-8 Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedua (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan Jumlah persentase dari total keseluruhan kapal yang berada di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dibandingkan dengan jumlah kapal yang memiliki izin.

a. Target dan Realisasi

Tabel 43 Target dan Realisasi Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75	82,03	109,37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator sampai dengan triwulan IV adalah 82,03 (persen), dengan membandingkan jumlah keseluruhan kapal dibandingkan dengan jumlah kapal yang berizin di PPS Bungus. Dengan capaian tersebut, maka persentasenya jika dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah 109,37%.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Tabel 44 Perbandingan Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	-	75	-	82,03	-

Tidak dapat dilakukan perbandingan karena indikator kinerja ini tidak ada pada tahun 2020.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 45 Perbandingan Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	82,03	100	-

Jika dibandingkan dengan target menenga dalam renstra, maka diperoleh perbandingan 82,03%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah apabila tercapainya target tahunan, yakni 75%. Persentase kapal berizin ini diperoleh dengan menghitung jumlah kapal yang memiliki izin (SIPI) dibandingkan dengan total seluruh kapal yang ada di PPS Bungus. Sehingga, adanya komitmen dari petugas kesyahbandaran dalam melakukan pendataan dan pengecekan masalah perizinan kapal menajadi faktor pendukung pencapaian indikator ini.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 46 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
37.455.000	35.530.800	109,37	94,86	14,51

Dalam menunjang pelaksanaan IKU Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di PPS Bungus tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 37.455.000,- sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 penyerapan anggaran untuk kegiatan IKU ini mencapai Rp. 35.530.800,- atau sebesar 94,86% dari total alokasi anggaran. Persentase capaian indikator tahun 2021 sebesar 109,37, sehingga dapat diperoleh tingkat efisiensi indikator ini adalah 14,51%.

Realisasi anggaran ini digunakan untuk keperluan Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Perizinan Pusat di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat berupa belanja bahan, belanja honor output kegiatan, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Adapun kegiatan yang menunjang tercapainya IKU ini adalah adanya Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Perizinan Pusat di Pelabuhan Perikanan UPT Pusat.

3.1.4 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (INPUT)

SS-9 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran strategis kedua (SS-9) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus”. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja berikut:

1. IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU ini adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas diukur menggunakan standar profesionalitas ASN yang terdiri dari empat dimensi, yaitu :

- 1) **Kualifikasi**, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
- 2) **Kompetensi**, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
- 3) **Kinerja**, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
- 4) **Disiplin**, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi

hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

a. Target dan Realisasi

Tabel 47 Target dan realisasi IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	73	80,51	110,29

Capaian indikator kinerja IP ASN melebihi target tahun 2021, yakni 110,29% dari target indeks 73. Keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh upaya dari kepegawaian dalam memberikan informasi terkait jadwal diklat di E-milea, mengajak para pegawai untuk ikut diklat, serta memonitoring IP ASN Pegawai sehingga dapat mengingatkan pegawai yang IP ASN nya masih rendah. Selain itu, adanya upaya dan antusias dari pegawai untuk mengikuti Diklat yang ada.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Tabel 48 Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	72	73	59,99	80,51	+26,98

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka terjadi peningkatan capaian sebesar 26,98%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya antusiasme pegawai pada tahun 2021 untuk mengikuti kegiatan seminar dan diklat, khususnya seminar dan diklat online yang banyak tersedia di E-milea dan kegiatan webinar lainnya.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 49 Perbandingan IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	80,51	72	111,82

Apabila dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra, maka diperoleh persentase sebesar 111,82 %. Hal ini didukung dengan terfasilitasinya pegawai dengan adanya diklat online di E-milea dan seminar-seminar lainnya yang dilaksanakan secara online, seperti webinar.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan Target Menengah.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Beberapa usaha yang telah dilakukan untuk tercapainya IKU tersebut adalah dengan memberikan kesempatan ASN untuk menempatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Webinar/Seminar/Workshop/Magang/Sejenis.

Keberhasilan capaian IP ASN di semester ini didukung oleh Upaya Kepegawaian dalam mengajak para pegawai untuk ikut diklat di E-milea, serta memonitoring IP ASN Pegawai sehingga dapat mengingatkan pegawai yang IP ASN nya masih rendah dan mendaftarkan pegawai untuk ikut Diklat.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 50 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
49.000.000	39.183.000	110,29	79,97	30,32

Dalam menunjang pelaksanaan IKU Anggaran IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 49.000.000,- sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 penyerapan anggaran untuk kegiatan IKU ini mencapai Rp.39.183.000 atau sebesar 79,97% dari total alokasi anggaran. Capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 110,29%, dengan demikian tingkat efisiensi adalah 30,32%.

Penyerapan anggaran ini digunakan untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, yakni rapat koordinasi undangan pusat.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang kinerja dalam RKAK/L adalah kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional.

2. Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . IKU Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan indikator yang menunjukkan nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus.

a. Target dan Realisasi

Tabel 51 Target dan Realisasi Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10	64,94	143,99

Capaian indikator kinerja nilai PM Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2021 adalah 144,27% dari target tahunan. Hal ini didukung oleh penerapan reformasi birokrasi di PPS Bungus serta dalam pengumpulan dan melengkapi segala dokumen keperluan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di PPS Bungus.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Tabel 52 Perbandingan Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase
	2020	2021	2020	2021	Kenaikan/Penurunan
Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10	45,10	66,75	64,94	- 4,01

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka terlihat adanya penurunan capaian sebesar 4,01% pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan masih ada kekurangan kelengkapan dokumen keperluan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di PPS Bungus jika dibandingkan dengan kelengkapan dokumen tahun 2020.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 53 Perbandingan Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	64,94	85	76,4

Nilai capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus Jika dibandingkan antara capaian tahun 2021 dengan target menengah dalam Renstra sebesar 89%.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan kegiatan ini adalah terlaksananya pemenuhan dokumen reformasi birokrasi di PPS Bungus melalui kegiatan penerapan dan pengumpulan data pembangunan zona integritas menuju WBK di Pelabuhan.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 54 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PM Pembangunan Zona Integritas PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
218.174.000	217.090.900	143,99	99,5	44,49

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung IKU ini telah direvisi kembali pada bulan Desember dari semula Rp.218.630.000,- , menjadi Rp. 218.174.000. Sampai dengan Triwulan IV, jumlah penyerapan anggaran sebesar Rp. 217.090.900,- atau 99,5% dari total alokasi anggaran Tahun 2021. Dengan capaian indikator sebesar 106,58%, maka tingkat efisiensinya adalah 7,08%. Realisasi anggaran ini digunakan untuk keperluan belanja bahan dan belanja keperluan dinas.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Komponen kegiatan pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang merupakan kegiatan dukungan penerapan Reformasi Birokrasi adalah kegiatan yang menunjang kinerja tersebut.

3. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator nilai SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

a. Target dan Realisasi

Tabel 55 Target dan Realisasi Nilai PM SAKIP PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Nilai PMSAKIP Pelaporan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85,15	90,75	106,58

Berdasarkan tabel 55. Dapat dilihat bahwa realisasi capaian tahun 2021 adalah 90,75, dengan persentase 106,58. Capaian ini dipengaruhi dengan terpenuhinya dokumen SAKIP PPS Bungus.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 56 Perbandingan Nilai PM SAKIP PPS Bungus Pada tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Nilai PMSAKIP Pelaporan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85	85,15	93,53	90,75	-3,45

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka terlihat bahwa terdapat penurunan sebesar 3,45%. Hal ini disebabkan penilaian kelengkapan dokumen SAKIP yang semakin detail di Tahun 2021.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 57 Perbandingan Nilai PM SAKIP PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai PMSAKIP Pelaporan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	90,75	85	106,76

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP PPS Bungus jika dibandingkan dengan Renstra presentasinya sebesar 106,76%. Disebabkan telah terpenuhinya dokumen SAKIP di PPS Bungus.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Telah ditandatangani Perjanjian Kinerja yang berisi target indikator kinerja dan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala merupakan poin penting dalam keberhasilan pencapaian IKU tersebut.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 58 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai PM SAKIP PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
15.000.000	11.866.200	106,58	79,11	27,47

Alokasi anggaran Tahun 2021 untuk mendukung IKU ini telah mengalami *refocusing* pada bulan Juli, semula Rp.50.000.000,- menjadi Rp.15.000.000,-. Sampai triwulan IV penyerapan anggaran sebesar Rp.11.866.200 atau sama dengan 79,11%. Dengan nilai capaian indikator sebesar 106,58, maka tingkat Efisiensinya adalah 27,47%. Adapun penyerapan anggaran ini digunakan untuk keperluan layanan pelaksanaan berupa belanja bahan, berupa belanja bahan dan belanja paket perjalanan dinas paket meeting luar kota.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Komponen kegiatan Perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap yang kegiatannya berupa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan perikanan tangkap adalah merupakan kegiatan penunjang untuk tercapainya IKU tersebut.

4. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

a. Target dan Realisasi

Tabel 59 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,50	88,40	121,93

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian tahun 2021 sebesar 88,40 atau 121,93% dari target tahun 2021. Hal ini dipengaruhi karena realisasi pelaksanaan PBJ dan terpenuhinya kelengkapan dokumen PBJ.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Tabel 60 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus Pada tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	-	72,5	-	88,4	-

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan IKU baru di tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 61 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	88,4	-	-

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan IKU baru di tahun 2021 dan belum ada dalam Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian tidak dapat dilakukan perbandingan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU ini disebabkan oleh pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa yang sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga dalam melakukan penilaian mandiri yang sesuai dengan Lembar Kerja Penilaian Mandiri Pengukuran Indikator Pengadaan PBJ mendapat bobot penilaian yang baik.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 62 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
108.674.000	101.699.691	121,93	93,58	28,35

Pagu anggaran ini mengalami revisi pada Bulan Desember. Dari Semula Rp.152.564.000,- menjadi Rp.108.674.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai 93,58%. Sementara itu, capaian indikator kinerja Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2021 mencapai 121,93%. Sehingga apabila dihitung efisiensinya pada indikator ini adalah 28,35%.

Adapun penyerapan anggaran ini digunakan untuk keperluan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, seperti: Penyusunan Laporan Sai, Implementasi Pengelolaan Anggaran, Penyusunan Laporan Semester, Pelaksanaan inventarisasi BMN Pelabuhan, Penghapusan BMN, Manajemen PNBPN, Sumber Daya Perikanan Dan Imbal Jasa Pelabuhan, Evaluasi Pelayanan Usaha, Tim Terpadu Dalam Rangka Pencapaian Target PNBPN, dan Monev Pelaporan Online Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pagu Anggaran ini berlaku untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang IKU ini pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa yang sudah sesuai dengan ketentuan.

5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

a. Target dan Realisasi

Tabel 63 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,50	87,50	120,68

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus adalah 87,50, sehingga capaiannya sebesar 120,68%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adanya kelengkapan dokumen pengelolaan BMN.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 64 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase Kenaikan/Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	-	72,5	-	87,5	-

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan IKU baru di tahun 2021, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020.

c. Perbandingan dengan Target Menengah

Tabel 65 Perbandingan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	-	-	-

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan IKU baru di tahun 2021 dan belum ada dalam Renstra Tahun 2020-2024. Dengan demikian tidak dapat dilakukan perbandingan.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat membandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan IKU ini disebabkan oleh pelaksanaan Pengelolaan BMN yang sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga dalam melakukan penilaian pada Lembar Kerja Penilaian Mandiri Pengukuran Indikator Pengadaan PBJ mendapat bobot penilaian yang baik.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 66 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker PPS Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
108.674.000	101.699.691	120,68	93,58	27,10

Pagu anggaran ini mengalami revisi pada Bulan Desember. Dari Semula Rp.152.564.000,- menjadi Rp.108.674.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai 93,58%. Sementara itu, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada tahun 2021 mencapai 120,68%. Sehingga apabila dihitung efisiensinya pada indikator ini adalah 27,10%.

Adapun penyerapan anggaran ini digunakan untuk keperluan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, seperti: Penyusunan Laporan Sai, Implementasi Pengelolaan Anggaran, Penyusunan Laporan Semester, Pelaksanaan inventarisasi BMN Pelabuhan, Penghapusan BMN, Manajemen PNB, Sumber Daya Perikanan Dan Imbal Jasa Pelabuhan, Evaluasi Pelayanan Usaha, Tim Terpadu Dalam Rangka Pencapaian Target PNB, dan Monev Pelaporan Online Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pagu Anggaran ini berlaku untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang IKU ini adalah pelaksanaan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang sesuai ketentuan.

6. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKAKL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

a. Target dan Realisasi

Tabel 67 Target dan Realisasi Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89	97,58	109,64

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian Nilai IKPA PPS Bungus sebesar 97,58 dengan persentase 109,64 dari target Tahunan. Tercapainya target ini tentu tidak terlepas dari komitmen semua pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pada Rencana Operasional Kerja (ROK) tahun 2021.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 68 Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada Tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Kenaikan/ Penurunan
	2020	2021	2020	2021	
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	88	89	98,62	97,58	- 3,24

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terlihat bahwa terdapat penurunan capaian sebesar 3,24 pada tahun 2021.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 69 Perbandingan Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan Target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	97,58	89	109,64

Jika dibandingkan capaian tahun 2021 dengan target menengah 2022, diperoleh persentase perbandingan sebesar 109,64%. Tercapainya target ini tentu tak lepas dari komitmen semua pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pada Rencana Operasional Kerja (ROK) tahun 2021.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran PPS Bungus Tahun 2021 adalah dengan menyampaikan data kontrak ke KPPN tepat waktu; ketepatan waktu revolving UP; ketepatan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari retur SP2D, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 70 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
108.674.000	101.699.691	109,64	93,58	16,06

Pagu anggaran ini mengalami revisi pada Bulan Desember. Dari Semula Rp.152.564.000,- menjadi Rp.108.674.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai 93,58%. Sementara itu, capaian indikator kinerja Nilai IKPA pada tahun 2021 mencapai 109,64%. Sehingga apabila dihitung efisiensinya pada indikator ini adalah 16,06%.

Adapun penyerapan anggaran ini digunakan untuk keperluan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, seperti: Penyusunan Laporan Sai, Implementasi Pengelolaan Anggaran, Penyusunan Laporan Semester, Pelaksanaan inventarisasi BMN Pelabuhan, Penghapusan BMN, Manajemen PNBPN, Sumber Daya Perikanan Dan Imbal Jasa Pelabuhan, Evaluasi Pelayanan Usaha, Tim Terpadu Dalam Rangka Pencapaian Target PNBPN, dan Monev Pelaporan Online Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pagu Anggaran ini berlaku untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang IKU ini adalah penyusunan RKAKL dan Kegiatan SIMAK dan SAIBA (Pelaksanaan Kegiatan Penyusun Administrasi Keuangan).

7. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

IKU Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan

- Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai - capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya
- Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DJPT kedalam aplikasi SMART Kemenkeu

a. Target dan Realisasi

Tabel 71 Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86	86,53	100,62

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran PPS Bungus mencapai 86,53% yang setara dengan 100,62% dari target tahunan. Hal ini didukung oleh konsistensi operator SMART DJA dalam melakukan update RVRO dan persentase progress bulanan secara lengkap yang sesuai dengan pencapaian satker.

b. Perbandingan Pada Tahun 2020 Pada Periode yang sama

Tabel 72 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Pada tahun 2020 Pada Periode yang Sama

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Persentase
	2020	2021	2020	2021	Kenaikan/Penurunan
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	-	86	-	86,53	-

IKU Nilai Kinerja Anggaran merupakan IKU baru di tahun 2021, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan di dengan Tahun 2020.

c. Perbandingan dengan target Menengah

Tabel 73 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dengan target Menengah

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Target Menengah Dalam Renstra	Persentase Perbandingan
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	-	-	-

IKU Nilai Kinerja Anggaran merupakan IKU baru di tahun 2021. IKU ini juga tidak terdapat dalam Renstra 2020-2024 sehingga dan tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam Renstra.

d. Membandingkan Realisasi dengan Standar Nasional

Tidak dapat dibandingkan dengan target nasional.

e. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran PPS Bungus Tahun 2021 adalah dengan mengisi RVRO dan persentase progres pada SMART DJA setiap bulannya secara lengkap dengan nilai maksimal yang dicapai oleh PPS Bungus; Penyerapan anggaran yang optimal, dan mengisi laporan Semester dan Tahunan Pada Aplikasi SMART DJA.

f. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 74 Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian Indikator	Persentase Terhadap Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
108.674.000	101.699.691	100,62	93,58	7,04

Pagu anggaran ini mengalami revisi pada Bulan Desember. Dari Semula Rp.152.564.000,- menjadi Rp.108.674.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV mencapai 93,58%. Sementara itu, capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2021 mencapai 100,62%. Sehingga apabila dihitung efisiensinya pada indikator ini adalah 7,04%.

Adapun penyerapan anggaran ini digunakan untuk keperluan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, seperti: Penyusunan Laporan Sai, Implementasi Pengelolaan Anggaran, Penyusunan Laporan Semester, Pelaksanaan inventarisasi BMN Pelabuhan, Penghapusan BMN, Manajemen PNBP, Sumber Daya Perikanan Dan Imbal Jasa Pelabuhan, Evaluasi Pelayanan Usaha, Tim Terpadu Dalam Rangka Pencapaian Target PNBP, dan Monev Pelaporan Online Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Pagu Anggaran ini berlaku untuk IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPS Bungus, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dan Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan.

g. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang

Kegiatan yang menunjang capaian IKU ini adalah pelaporan RVRO dan Persentase Progres Bulanan secara rutin setiap bulan pada aplikasi SMART DJA.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.259.577.000,- sesuai dengan DIPA PPS Bungus Tangkap TA. 2021 Nomor: SP DIPA-032.03.2.531488/2021 Tanggal 23 November 2020. Pada bulan Juli 2021, terjadi refocusing anggaran, sehingga anggaran PPS Bungus menjadi Rp. 12.654.907.000,-. Selanjutnya pada bulan November mengalami *Refocusing* kembali menjadi Rp. 12.564.907.000,- .

Alokasi anggaran tersebut untuk 5 (lima) kegiatan, yakni :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

Realisasi anggaran sampai Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar Rp. Rp.12.327.601.506.- atau sebesar 98,11% dari pagu sebesar Rp. 12.564.907.000,- .

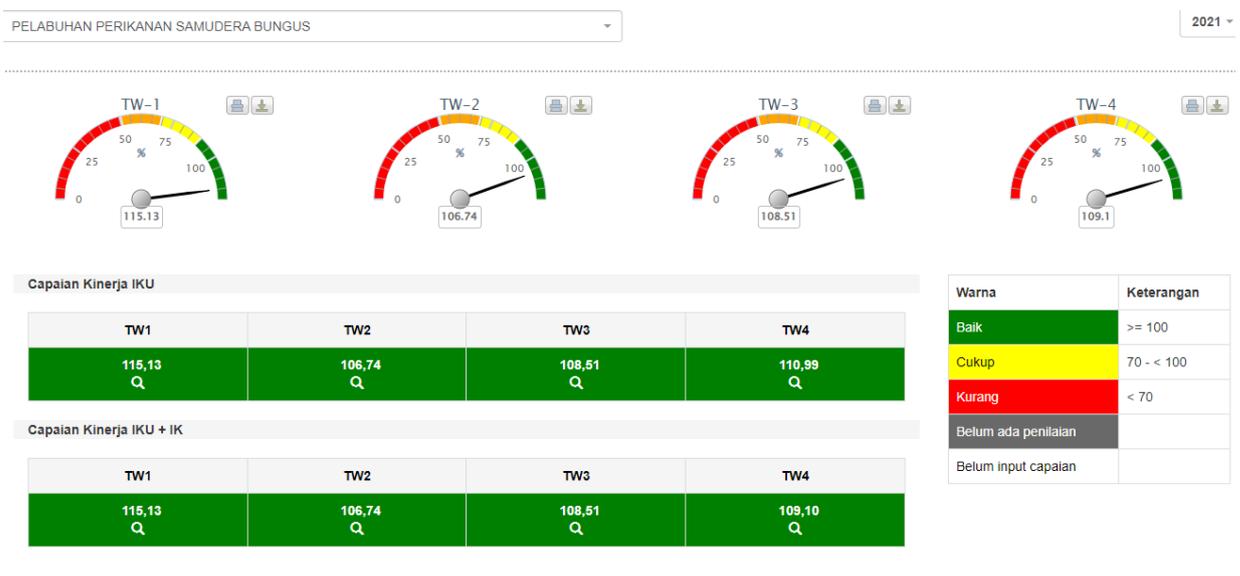
Tabel 75. Realisasi Penyerapan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan PPS Bungus Tahun 2021

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp.)	% Realisasi Anggaran
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.581.132.000,-	1.469.448.405,-	92,94
1 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	16,500,000,-	16.416.000,-	
2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.416.090,000,-	1.315.817.819,-	
3 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	41.455.000,-	39.517.800,-	
4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	107.087.000,-	97.696.786,-	
Program Dukungan Manajemen	10.983.775.000,-	10.822.153.101,-	98,53
5 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	10.983.775.000,-	10.822.153.101,-	

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Bungus selama tahun 2021 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebesar **109,10 persen**.



Gambar 4. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

Dari hasil pengukuran kinerja Dirjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Bungus Tahun 2021 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, dari 17 Indikator Kinerja yang ditetapkan, 16 (enam belas) IKU telah mencapai nilai/angka lebih besar atau sama dengan 100%, sementara satu IKU tidak mencapai 100%, yakni IK2-Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana dibahas pada Bab 3, hal yang dapat disarankan untuk peningkatan kinerja, guna pencapaian target pada tahun berikutnya difokuskan secara khusus untuk IKU Nilai PNBP Pelabuhan yang tidak tercapai ditahun 2021. Berangkat dari ketidaktercapaian ini, maka kedepannya perlu dilakukan evaluasi pengelolaan PNBP dengan membandingkan capaian tahun 2020 dengan 2021 melalui jenis penerimaannya. Sehingga dapat dilihat gambaran penurunan/kenaikan

dari jenis penerimaan tersebut untuk kemudian dianalisis alasan penurunan/kenaikannya. Dengan demikian dapat dilakukan upaya perbaikan/peningkatan pada tahun berikutnya.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil kinerja PPS Bungus secara utuh. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Kinerja PPS Bungus Tahun 2021 masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur.

Semoga Laporan Kinerja PPS Bungus Tahun 2021 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja PPS Bungus Tahun 2021 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja PPS Bungus pada tahun selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1: RENCANA KINERJA**UNIT KERJA : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**
TAHUN : 2021

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pendapatan Nelayan Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)	100
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2.	Nilai PNBPD Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.214
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3.	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (Dokumen)	1
		4.	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (Laporan)	100
4.	Produksi Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	5.000
5.	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	6.	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	1
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	7.	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan (Persen)	81
7.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8.	Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (Orang)	10
		9.	Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	20
8.	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10.	Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	11.	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	73
		12.	Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10
		13.	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85,15

		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		16.	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89
		17.	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soma Somantri

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Zaini

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap

Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus

Soma Somantri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)	100
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2.	Nilai PNBP Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.214
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3.	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (Dokumen)	1
		4.	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (Laporan)	100
4.	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	5.000
5.	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	6.	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	1
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	7.	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan (Persen)	81
7.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8.	Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (Orang)	10
		9.	Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	20
8.	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10.	Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
8.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	11.	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	73
		12.	Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	75,07
		13.	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85,15
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		16.	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89
		17.	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86

Program : 1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Rp. 3.050.042.000,-
2. Dukungan Manajemen Rp. 11.245.535.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : **Rp. 14.295.577.000,-**

Jakarta, 14 Januari 2021

Pihak Kedua
Ptl. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus


Soma Somantri

Lampiran 3: PERJANJIAN KERJA (PK) PERUBAHAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

JL. RAYA PADANG – PAJANAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT
TELEPON/FAX: (0751) 751122 EMAIL : pps.bungus@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Soma Somantri**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap


Muhammad Zaini

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus


Soma Somantri

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PERUBAHAN
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pendapatan Nelayan Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	1.	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Pendanaan Usaha Perikanan Tangkap (Orang)	100
2.	Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	2.	Nilai PNBP Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Rp. Juta)	1.214
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	3.	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan SDI di WPP 572 (Dokumen)	1
		4.	Jumlah Laporan Data Logbook Penangkapan Ikan yang Telah Di Kumpulkan dan Diverifikasi di Pelabuhan Perikanan (Laporan)	100
4.	Produksi Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	5.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Ton)	5.000
5.	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	6.	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	1
6.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan	7.	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan (Persen)	81
7.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Berdaya Saing Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	8.	Jumlah Nelayan/Awak Kapal Perikanan yang Ditingkatkan Pengetahuan/Kompetensinya (Orang)	10
		9.	Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diterapkan	20
8.	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	10.	Persentase Kapal Perikanan yang Berizin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	75
9.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	11.	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Indeks)	73
		12.	Nilai capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	45,10
		13.	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	85,15
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Persen)	72,5
		16.	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	89
		17.	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus (Nilai)	86

Program : 1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Rp. 1.581.132.000,-
2. Dukungan Manajemen Rp. 11.073.775.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 12.654.907.000,-

Jakarta, 01 September 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus


Muhammad Zaini


Soma Somantri